



**Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Gorontalo**

# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA

### TAHUN ANGGARAN 2023



[gorontalo.bpk.go.id](http://gorontalo.bpk.go.id)



[bpkrigorontalo](https://www.instagram.com/bpkrigorontalo)



[gorontalo-ppid.bpk.go.id](http://gorontalo-ppid.bpk.go.id)



# **LAPORAN KINERJA**

## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023**



**INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo disusun dalam rangka penyusunan LAK BPK guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BPK periode 2020 - 2024. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *good and clean government*

serta sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun berikutnya.

Perhatian pemilik kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap kinerja pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Kondisi ini kian menguatkan semangat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi BPK “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang ditandatangani Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo merupakan pengejawantahan atas sasaran strategis BPK guna mewujudkan visi dan misi BPK.

Akhirnya dengan semangat integritas, independensi, dan profesionalisme untuk memberikan kontribusi terbaik, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya membangun kultur organisasi perwakilan yang lebih baik agar kepercayaan pemilik kepentingan terhadap kinerja BPK semakin meningkat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Gorontalo, 31 Januari 2024  
Kepala Perwakilan

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA  
NIP 196701131988031001

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO .....	10
D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO .....	12
1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	12
2. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	13
3. SARANA DAN PRASARANA .....	14
E. ISU STRATEGIS.....	19
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>22</b>
<b>BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO</b> .....	<b>22</b>
A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO .....	22
B. TARGET KINERJA .....	25
1. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i> .....	25
2. <i>Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023</i> .....	27
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
<b>BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO</b> .....	<b>28</b>
A. HASIL EVALUASI AKIP .....	28
B. CAPAIAN KINERJA .....	30
1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 .....	30
2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR .....	30
3. PERBANDINGAN CAPAIAN IK TAHUN 2023 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN 32	
4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IK TAHUN 2023.....	33
C. ANALISIS EFISIENSI .....	56
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA .....	58

E. REALISASI ANGGARAN .....	59
F. INOVASI .....	59
G. PENGHARGAAN .....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM .....	59
B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR .....	59
C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IK TAHUN 2023 .....	63
D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2023 .....	65
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

# DAFTAR TABEL

---

TABEL 1 NILAI EKA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 .....	13
TABEL 2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023.....	26
TABEL 3 CAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023.....	30
TABEL 4 PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN PELAPORAN DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR.....	32
TABEL 5 PERBANDINGAN REALISASI IK TAHUN 2023 DENGAN TARGET KINERJA LIMA TAHUN ...	32
TABEL 6 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 1 TAHUN 2020-2024 .....	34
TABEL 7 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 2 TAHUN 2020-2024 .....	35
TABEL 8 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 3 TAHUN 2020-2024 .....	37
TABEL 9 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 4 TAHUN 2020-2024 .....	40
TABEL 10 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 5 TAHUN 2020-2024 .....	41
TABEL 11 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 6 TAHUN 2020-2024 .....	43
TABEL 12 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 7 TAHUN 2020-2024 .....	44
TABEL 13 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 8 TAHUN 2020-2024 .....	46
TABEL 14 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 9 TAHUN 2020-2024 .....	48
TABEL 15 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 10 TAHUN 2020-2024 .....	50
TABEL 16 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 11 TAHUN 2020-2024 .....	52
TABEL 17 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 12 TAHUN 2020-2024 .....	54
TABEL 18 PERKEMBANGAN CAPAIAN IK 13 TAHUN 2020-2024 .....	55
TABEL 19 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN, RINCIAN OUTPUT, DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023 .....	59

# DAFTAR GAMBAR

---

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	10
GAMBAR 2 KANTOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO .....	15
GAMBAR 3 MESS PEGAWAI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	15
GAMBAR 4 RUMAH JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI GORONTALO .....	16
GAMBAR 5 RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON III.....	16
GAMBAR 6 RUMAH JABATAN STRUKTURAL ESELON IV .....	17
GAMBAR 7 MUSHOLA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	17
GAMBAR 8 PLAZA TINEPO BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO .....	18
GAMBAR 9 KENDARAAN DINAS KEPALA PERWAKILAN .....	18
GAMBAR 10 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN .....	19
GAMBAR 11 MOTOR DINAS OPERASIONAL PERWAKILAN .....	19
GAMBAR 12 PETA STRATEGI AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI.....	25
GAMBAR 13 PETA STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO.....	26

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi



# **BAB I. PENDAHULUAN**

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bagian Keenam Pelaporan Kinerja Pasal 18 (1) yang menetapkan antara lain bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. BPK sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja Tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kesembilan Belas Pasal 735 ayat (1)

yang menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI, dan Pasal 736 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

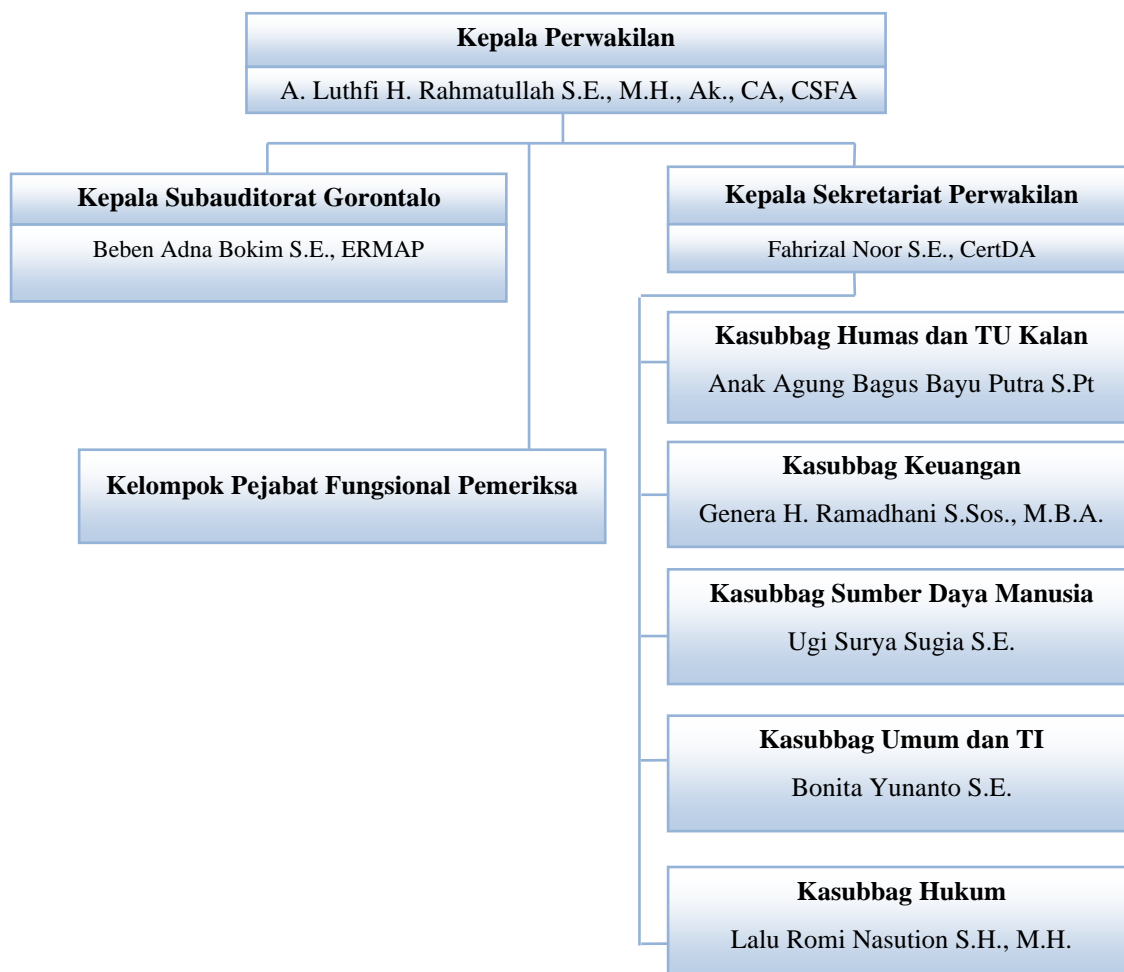
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 di atas, sesuai Pasal 737 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kecuali Pemeriksaan Investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pengkompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK

- Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
  13. Penyiapan bahan perumusan bahan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
  15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
  16. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
  17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
  18. Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
  19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai delapan pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI), Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, dan Kepala Subbagian Hukum.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah unsur pelaksana BPK. Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

## 1. Subauditorat Gorontalo

Subauditorat Gorontalo mempunyai tugas:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) Mengevaluasi hasil kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

## 2. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- g. Penyiapan bahan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan TI, dan Subbagian Hukum.

### 3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN VI dan Auditorat Utama Investigasi.

## **D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

### **1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023 sebanyak 104 orang terdiri atas 79 Aparatur Sipil Negara (ASN), dua Calon ASN, dan 23 Tenaga Tidak Tetap. ASN terdiri atas delapan pejabat struktural yaitu Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Hukum, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Kepala Subbagian Umum dan TI, 56 orang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), 15 orang penunjang/pendukung, dan dua calon ASN. Selain ASN dan CASN tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo didukung oleh tenaga tidak tetap berjumlah 23 orang yang terdiri atas satu orang tenaga administrasi, 13 orang satuan pengamanan (Satpam), empat orang

pengemudi, dua orang tenaga medis yang terdiri atas dokter dan perawat, dua orang tenaga teknis, serta satu orang tenaga resepsionis.

Ditinjau dari masa kerja ASN di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, masa kerja seluruh ASN dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Masa kerja 4 Tahun ke atas sebanyak 20 pegawai
- b. Masa kerja 2 s.d. 4 Tahun sebanyak 13 pegawai
- c. Masa kerja 2 Tahun ke bawah sebanyak 46 pegawai

## 2. SUMBER DAYA KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada TA 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp16.737.520.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.693.869.032,00 atau 99,74% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi TA 2022 yakni anggaran sebesar Rp14.708.811.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.510.358.196,00 atau 98,65%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama TA 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 15 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp15.388.824.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp16.737.520.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Hasil pengukuran atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal BPK, terdiri dari:

- a. Pengukuran EKA menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai nilai sebesar 85,83% dengan rincian komponen pendukung sebagai berikut.

**Tabel 1 Nilai EKA BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
99,74%	100%	99,83%	50,65%	85,83%

Berdasarkan evaluasi tersebut, nampak bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih memerlukan peningkatan dalam hal efisiensi anggaran perwakilan.

- b. Pengukuran nilai EPA menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 95,55%.

Dua hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kinerja perwakilan, dan dikomunikasikan dengan Biro Keuangan untuk mendapat *insight* tentang bagaimana meningkatkan nilai efisiensi serta nilai EPA pada TA 2024.

### **3. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai sebagai berikut.

a. Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga bidang tanah pada lokasi berbeda yaitu :

- 1) Seluas 3.485 m<sup>2</sup> di Jalan Brigjen Piola Isa diperoleh pada Tahun 2012 digunakan untuk Mess Pegawai serta Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II.
- 2) Seluas 5.931 m<sup>2</sup> di Jalan Tinaloga Nomor 3 diperoleh pada Tahun 2009 digunakan untuk gedung kantor, poliklinik, ruang olah raga, dan gudang.
- 3) Seluas 6.450 m<sup>2</sup> di Jalan Tinaloga No. 3 (disebelah Kantor) diperoleh Tahun 2016. Tanah tersebut masih dalam proses pembangunan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tanah seluas 15.866m<sup>2</sup>.

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terletak di Jalan Tinaloga Nomor 3, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang mulai ditempati pada awal Tahun 2011. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur/bagian depan kantor berbatasan dengan Jln. Tinaloga/Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sedangkan sebelah Selatan dengan Kantor Pengadilan Tinggi dan Barat berbatasan dengan areal persawahan. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu:

- 1) Lantai pertama seluas 926 m<sup>2</sup>.
- 2) Lantai dua seluas 1.352 m<sup>2</sup>.



3) Lantai tiga seluas 838 m<sup>2</sup>.

**Gambar 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**



c. Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Tahun 2012 dibangun Mess dua lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 325 m<sup>2</sup>. Fasilitas Mess terdiri atas 19 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, ruang makan, *lobby*, dan ruang pengelola.

**Gambar 3 Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**



d. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, pada Tahun 2013 mulai dibangun Rumah Jabatan Kepala

Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas masing-masing kurang lebih 200 m<sup>2</sup>. Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas dua kamar tidur utama, dua kamar tidur tamu, dua kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.

**Gambar 4 Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo**



e. Rumah Jabatan Struktural Eselon III dan IV

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2023 memiliki tujuh unit rumah jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak dua unit dan struktural eselon IV sebanyak lima unit. Rumah jabatan tersebut dibangun pada Tahun 2015, seluruh rumah jabatan telah dihuni sejak Tahun 2016.

**Gambar 5 Rumah Jabatan Struktural Eselon III**



**Gambar 6 Rumah Jabatan Struktural Eselon IV**



f. Fasilitas Ibadah

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki Mushola seluas 40 m<sup>2</sup> yang diberi nama Al Muhajirin yang dibangun pada Tahun 2016. Mushola tersebut terletak disebelah barat gedung kantor atau disamping garasi mobil.

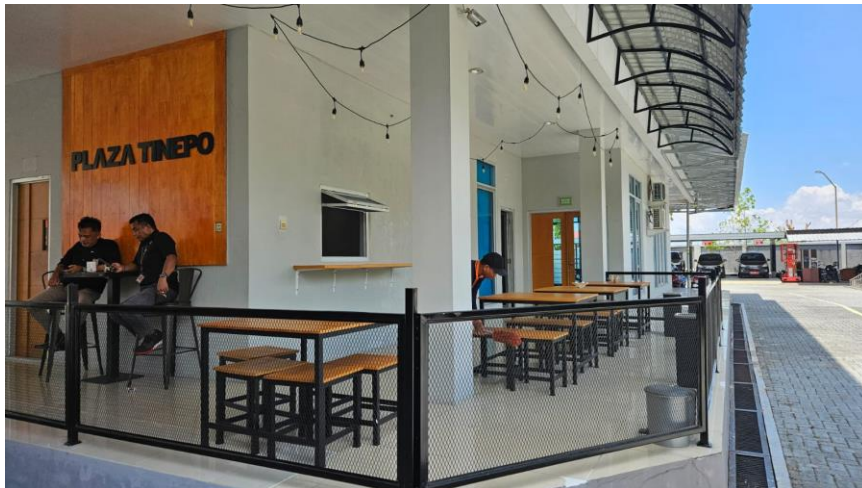
**Gambar 7 Mushola BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**



g. Fasilitas Plaza TINEPO

Plaza Tinepo adalah ruang publik yang disediakan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sehingga semua orang dapat berinteraksi secara santai atau dapat dijadikan sebagai *co-working space* bagi para pegawai. Plaza TINEPO dibangun pada Tahun 2023.

**Gambar 8 Plaza TINEPO BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**



**h. Kendaraan dan Peralatan Penunjang Operasional**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai kendaraan dan peralatan penunjang operasional, antara lain berupa kendaraan roda empat sebanyak delapan unit dan kendaraan roda dua sebanyak sembilan unit, tujuh alat ukur universal, empat mesin ketik listrik, PC 65 unit, notebook 23 unit, printer 53 unit, kalkulator 20 unit, mesin fotokopi tujuh unit, proyektor LCD 21 unit, scanner 49 unit dan *lift* 1 unit.

**Gambar 9 Kendaraan Dinas Kepala Perwakilan**



**Gambar 10 Kendaraan Dinas Operasional Perwakilan**



**Gambar 11 Motor Dinas Operasional Perwakilan**



## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan isu strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 2020-2024. Isu strategis yang dimaksud adalah terkait dengan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Berdasarkan data SIPTL per 31 Desember 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai angka 78,08%. Sedangkan berdasarkan data IHPS Semester I 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada pada angka 72,48%. Perbedaan tersebut setelah 266 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo atas hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2023 (Pemeriksaan Kinerja dan DTT), entitas diberi waktu untuk menindaklanjuti dalam jangka 60 hari setelah LHP diserahkan.

Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama dan menjadi perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengingat bahwa sasaran strategis dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Renstra 2020-2024 adalah Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis tersebut ditetapkan indikator yang salah satunya adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan analisis untuk mengetahui penyebab masih rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan diketahui antara lain adalah:

1. Komitmen

Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:

- a. Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
- b. Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.

2. Pemahaman Terbatas

- a. Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
- b. Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.

3. Perubahan Regulasi

Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.

4. Subjek PTL Tidak Ada

Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus mengupayakan agar target 75,00% dapat segera tercapai, melalui strategi percepatan penyelesaian TRLHP. Strategi tersebut meliputi:

1. penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
2. membuka jalur konsultasi dan bimbingan percepatan TL;
3. inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran SKPD beserta penyebabnya;
4. memilah rekomendasi yang bersifat finansial dan non finansial;

5. berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap SKPD;
6. menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja satker (SKPD); membangun komitmen dengan kepala daerah agar proaktif menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam tindak lanjut;
7. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
8. berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam rangka percepatan validasi.

# **BAB II. PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

---

## **A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Lampiran LXXVIII Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis.

### 1. Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Visi ini berarti bahwa sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UUD 1945, BPK pada periode 2020-2024 akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

### 2. Misi

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan Misi 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi dan usulan bahan pendapat;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya di Provinsi Gorontalo.

### 3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi



Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

5. Sasaran Strategis

Untuk periode 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, usulan bahan pendapat dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga berkomitmen untuk

menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian daerah yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi dan usulan bahan pendapat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9)

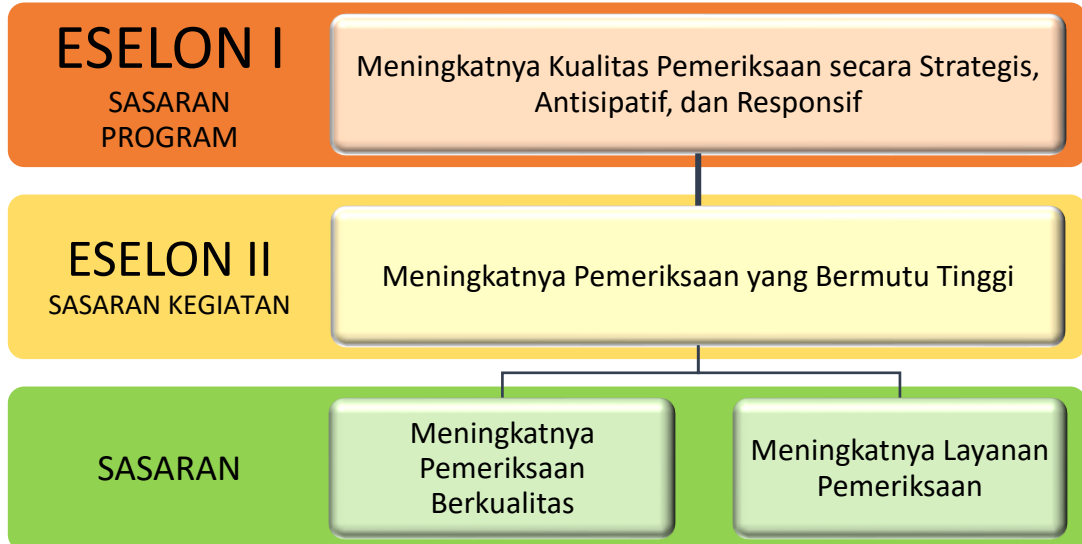
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

## B. TARGET KINERJA

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai kepanjangan BPK untuk wilayah Timur menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan Indikator Kinerja yang akan dicapai Tahun 2023. Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja Tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap Tahunnya. Keterkaitan tugas dan fungsi AKN VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis AKN VI berikut ini.

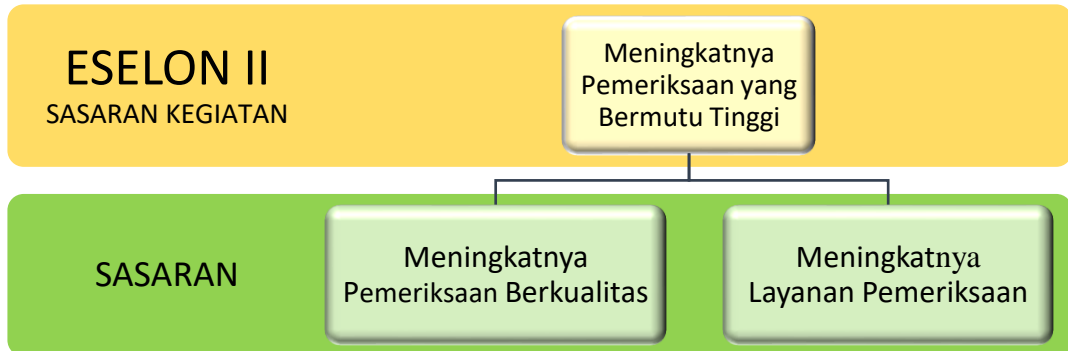
Gambar 12 Peta Strategi Auditorat Keuangan Negara VI



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selaku satuan kerja pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang kemudian dijabarkan dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian

Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berikut.

**Gambar 13 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**



Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun Indikator Kinerja (IK) beserta target pencapaian IK Tahun 2023. IK beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember Tahun 2023. Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp15.388.842.000,00	1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp5.773.216.000,00	2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp9.615.626.000,00	3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13.	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menargetkan pencapaian atas 13 IK, yang terdiri atas:

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP;
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memanfaatkan anggaran yang diberikan sebesar Rp15.388.842.000,00 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

## **2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023**

Rencana aksi pencapaian target kinerja memuat rincian kegiatan yang mendukung pencapaian tiap IK setiap triwulan secara rinci dan lengkap yang dapat menggambarkan upaya BPK Perwakilan Provinsi dalam mencapai target indikator kinerja. Pada rencana aksi memuat angka target setiap Triwulanan dengan mempertimbangkan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini tampak antara lain pada IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah dengan meningkatkan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) serta pada IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, rencana aksi yang dibuat adalah mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Rencana aksi secara rinci disajikan pada Lampiran 1.

# **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

---

## **A. HASIL EVALUASI AKIP**

Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Internal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan direviu oleh Inspektorat Utama atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan mendapatkan nilai sebesar **91,40** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**, dengan hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

### **1. Perencanaan Kinerja**

Capaian organisasi pada komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 27,60 atau 92% dari bobot 30. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound* (SMART) dan cukup, serta menggunakan penjenjangan kinerja hingga ke level individu dengan logis. Perencanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil organisasi yang berkesinambungan dan selalu dilakukan evaluasi. Perencanaan penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mendukung kinerja dimana proses penyusunan, penelitian, dan reviunya telah menggunakan aplikasi ProsesRKA. Namun, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum memiliki upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di tingkat satuan kerja terkait perencanaan kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen perencanaan kinerja dan memperbaiki apa yang menjadi catatan.

### **2. Pengukuran Kinerja**

Capaian organisasi pada komponen pengukuran kinerja mendapatkan nilai 27,00 atau 90,00% dari bobot 30. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan menggunakan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara

triwulanan. Selain itu, terdapat upaya inovatif pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang layak menjadi percontohan antara lain Inovasi Optimalisasi Pemanfaatan Portal dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan dan Pemantauan TLRHP-Runeg. Upaya inovatif telah ditetapkan dengan Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) Nomor 53/ND/XII.1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Nomor 408/ND/XII.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023. Namun, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum memenuhi satu dari tiga sub komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen pengukuran kinerja yaitu pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan atas apa yang telah tercapai pada komponen perencanaan kinerja dan memperbaiki apa yang menjadi catatan dengan berkoodinasi dengan Biro SDM terkait pemberian *reward and punishment*.

### 3. Pelaporan Kinerja

Capaian organisasi pada komponen pelaporan kinerja mendapatkan nilai 13,30 atau 88,67% dari bobot 15. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Penyusunan LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 telah mempedomani Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 dan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 38/ND/XII.1/01/2023. Evaluasi dalam LAKIN telah dimanfaatkan untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi seluruh komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen pelaporan kinerja namun belum ada upaya inovatif atau layak menjadi percontohan ditingkat satuan kerja terkait dengan pelaporan kinerja.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian organisasi pada komponen evaluasi internal mendapatkan nilai 23,00 atau 92,00% dari bobot 25,00. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti *sharing knowledge* untuk meningkatkan kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi seluruh komponen yang digunakan sebagai ukuran penilaian komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum ada upaya

inovatif atau layak menjadi percontohan ditingkat satuan kerja terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## B. CAPAIAN KINERJA

### 1. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyusun IK beserta target pencapaian kinerja Tahun 2022. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Tortama KN VI selaku Eselon I, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo selaku Eselon II di Jakarta pada Bulan Desember Tahun 2022. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target dan realisasi Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 hasil evaluasi Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 3 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

No. (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,86%	82,86
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	72,48% *)	96,64
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,55%	100,55
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,00
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,00%	100,00
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,79)	95,80
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	AA (91,40)	102,70
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,93%	101,07
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	101,43%	101,43
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,61)	105,00
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00
IK 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	89,72%	101,38
<b>Total Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>				<b>98,86</b>

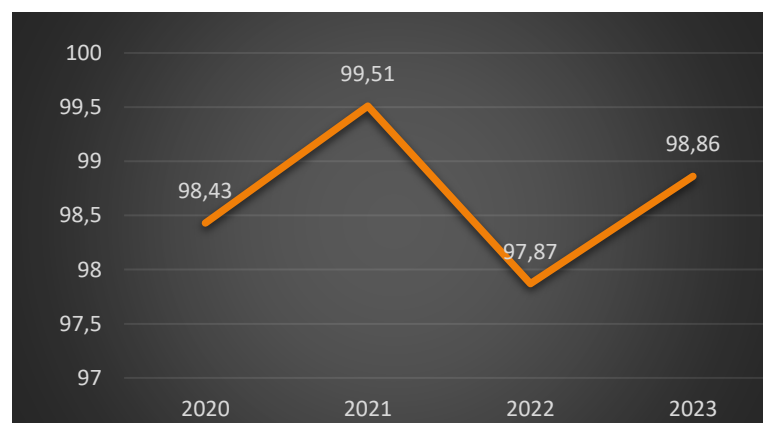
\*)Data berdasarkan TLRHP IHPS Semester I 2023 sedangkan data SIPTL per 31 Desember 2023 sebesar 78,08%



## 2. PENCAPAIAN SKOR BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO PADA DUA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan skor lima Tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan karena sejak Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah menggunakan indikator kinerja sesuai dengan Renstra BPK periode 2020 – 2024, berbeda dengan Tahun 2019 yang masih menggunakan indikator kinerja sesuai Renstra periode 2016 – 2020 sebelumnya. Hasil capaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 98,86. Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 97,87 namun lebih rendah dibandingkan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 99,51. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.

**Grafik 1 Tren Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d 2023**



Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atas pencapaian kinerja dibandingkan tahun terakhir. Terdapat tiga IK yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2023 yaitu IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. IK yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022, yaitu IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

Adapun rincian pencapaian skor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada empat tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4 Perbandingan Capaian Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IK 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	100%
	IK 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%	100%	100%
	IK 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	76,31%	72,83%	69,78%*)	72,48%	75%
	IK 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	100%
	IK 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,60%	100,07%	100,00%	100%
	IK 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	101%	100,30%	100,51%	100,00%	100%
	IK 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Memuaskan (4,47)	Memuaskan (4,41)	Sangat Memuaskan (4,80)	Sangat Memuaskan (4,79)	Sangat Memuaskan (5,00)
	IK 8. Hasil Evaluasi AKIP	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)	AA (91,40)	A (89,00)
	IK 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,66%	99,66%	90,27%	99,93%	98%
	IK 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	125%	137,50%	100,00%	101,43%	100%
	IK 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,47)	Memuaskan (3,89)	Memuaskan (3,65)	Sangat Memuaskan (4,61)	Memuaskan (3,80)
	IK 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	IK 13. Tingkat Kinerja Anggaran	89,34%	92,43%	90,04%	89,72%	88,50%
<b>Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>		<b>98,43</b>	<b>99,51</b>	<b>97,87</b>	<b>98,86</b>	

\*)Data berdasarkan TLRHP IHPS Semester I 2023 sedangkan data SIPTL per 31 Desember 2023 sebesar 78,08%

### 3. PERBANDINGAN CAPAIAN IK TAHUN 2023 DENGAN TARGET KERJA LIMA TAHUN

Perbandingan capaian IK Tahun 2022 dengan target kerja lima Tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi IK Tahun 2023 dengan Target Kinerja Lima Tahun**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	82,86%	82,86%
IK 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	72,48%*)	96,64%
IK 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,55%	100,55%
IK 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IK 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam Pemeriksaan Tematik Lokal							
IK 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sangat Memuaskan (4,79)	95,80%
IK 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (87)	A (87)	A (87)	AA (91,40)	102,70%
IK 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	96%	96%	99,93%	101,97%
IK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	101,43%	101,43%
IK 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	Sangat Memuaskan (4,61)	105,00%
IK 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IK 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88,00%	87,50%	87,50%	89,72%	101,38%

\*)Data berdasarkan TLRHP IHPS Semester I 2023 sedangkan data SIPTL per 31 Desember 2023 sebesar 78,08%

#### 4. PENJELASAN ATAS CAPAIAN IK TAHUN 2023

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga Indikator Kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target pada Tahun 2023 yakni IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing IK sebagai berikut.

##### a. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil rewiu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Aktivitas pelaksanaan *QA* dan *QC* dilaksanakan dengan cara melaksanakan *QC* mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh seluruh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab di setiap penugasan serta melaksanakan *QA* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan untuk seluruh pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mewajibkan tim pemeriksa

untuk menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sesuai petunjuk pelaksanaan KKP, dan menyimpan kertas kerja tersebut secara elektronik maupun secara fisik.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase dari 40% dikalikan hasil QA dan QC Satker ditambah 60% dikalikan hasil evaluasi EPP (tingkat akurasi 60% + tingkat konsistensi 40%). Sumber data yang digunakan adalah dokumen lembar *checklist* QA dan QC, hasil evaluasi EPP, dan hasil reviu Itama. Adapun perkembangan capaian IK 1 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6 Perkembangan Capaian IK 1 Tahun 2020-2024**

IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	
Capaian	71,43%	86,25%	83,75%	82,86%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				82,86%	

Realisasi IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2023 adalah sebesar 82,86% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 82,86%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan nilai Tahun sebelumnya sebesar 83,75%. Realisasi IK 1 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 baru mencapai 82,86%. Ketidaktercapaian dan penurunan tersebut salah satunya disebabkan karena berdasarkan evaluasi dari EPP masih ditemukan ketidakakuratan, ketidakonsistenan dan kesalahan lainnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu belum berjalan secara optimal. Meskipun telah mengupayakan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum dapat memperoleh hasil evaluasi yang memadai dari Direktorat EPP sehingga skor yang dicapai Tahun 2023 masih berada pada angka 82,86%, dari target sebesar 100%.

Masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam setiap LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan berusaha memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling

dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk secara konsisten melaksanakan QA dan QC agar kualitas pemeriksaan dan LHP dapat senantiasa terjaga, sehingga Tahun 2024 dapat menaikkan capaian skornya sesuai target yang ditetapkan.

**b. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP. Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi untuk meningkatkan kualitas LHP, memastikan tercapainya simpulan LHP di Perwakilan Gorontalo sesuai harapan penugasan yang telah ditetapkan dalam P2;
- 2) Memastikan penyusunan P2 LHP (terinci) secara berjenjang;
- 3) Melaksanakan reviu berjenjang Penyusunan P2 LHP (terinci);
- 4) Memastikan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan DTT dengan simpulan telah sesuai dengan P2.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dibagi jumlah LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan. Sumber data yang digunakan adalah P2 Kinerja dan DTT dan LHP Kinerja dan DTT. Adapun perkembangan capaian IK 2 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7 Perkembangan Capaian IK 2 Tahun 2020-2024**

IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				100%	

Realisasi IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%,

sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mencapai nilai yang sama dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 100%. Realisasi IK 2 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan saat itu BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga agar seluruh simpulan dari LHP sesuai dengan harapan penugasan pimpinan atau 100% untuk seluruh LHP, dan target 100% dapat dipertahankan secara konsisten sampai dengan Tahun 2024. Untuk menjaga capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan peningkatan kualitas QA dan QC, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil pemeriksaan dengan harapan penugasan.

**c. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005. Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada Tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan upaya percepatan penyelesaian TLRHP untuk memenuhi target kinerja, melalui kegiatan:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) membuka jalur konsultasi dan bimbingan percepatan TL;
- 3) inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran SKPD beserta penyebabnya;
- 4) memilah rekomendasi yang bersifat finansial dan non finansial;

- 5) berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap SKPD;
- 6) menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja satker (SKPD);
- 7) komitmen dari kepala daerah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam tindak lanjut; dan
- 8) berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam rangka percepatan validasi.

Upaya ini bermanfaat dalam mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibagi jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*.

Berdasarkan data SIPTL per 31 Desember 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai angka 78,08%. Sedangkan berdasarkan data IHPS Semester I 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada pada angka 72,48%. Perbedaan tersebut disebabkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Semester II dan terdapat 266 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo atas hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2023 (Pemeriksaan Kinerja dan DTT), entitas diberi waktu untuk menindaklanjuti dalam jangka 60 hari setelah LHP diserahkan.

Adapun perkembangan capaian IK 3 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8 Perkembangan Capaian IK 3 Tahun 2020-2024**

IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76,31%	72,83%	69,78%	72,48%	
Capaian	101,75%	97,11%	93,04%	96,64%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			93,04%	96,64%	

\*) Data berdasarkan TLRHP IHPS Semester I 2023

Realisasi IK 3 Persentase TLRHP Tahun 2023 adalah sebesar 72,48% dari target sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 96,64%. Realisasi IK ini pada

Tahun 2023 lebih tinggi (meningkat) dibandingkan nilai Tahun 2022 sebesar 69,78%. Realisasi IK 3 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 baru mencapai 96,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan penyelesaian TLRHP yang dilakukan telah berjalan secara optimal dan masih dalam progres untuk mencapai target 75%.

Capaian ini tidak memenuhi target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 75%. Hal tersebut disebabkan karena antara lain:

- 1) Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:
  - a) Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
  - b) Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- 2) Pemahaman Terbatas
  - a) Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
  - b) Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- 3) Perubahan Regulasi  
Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- 4) Subjek PTL Tidak Ada  
Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Pada periode Renstra 2020 – 2024, di Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sempat mencapai persentase TLRHP sebesar 76,31%, dan capaian ini menurun pada Tahun 2021 menjadi 72,83% dan Tahun 2022 menjadi 69,78%.

Untuk menjamin agar capaian di Tahun berikutnya dapat memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mengoptimalkan upaya-upaya percepatan TLRHP melalui kegiatan:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) Membuka kesempatan pematkhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi



- oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);
- 3) Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
  - 4) Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;
  - 5) Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
  - 6) Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
  - 7) Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan.

**d. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu Tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang, tugas, dan fungsi satuan kerja masing-masing dengan satu satuan kerja sebagai koordinator. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan terus berpartisipasi dalam setiap pemeriksaan tematik nasional selama Tahun 2023.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing Satuan Kerja pada setiap pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah dokumen BAST

LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya, RKP, dan Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya. Adapun perkembangan capaian IK 4 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 9 Perkembangan Capaian IK 4 Tahun 2020-2024**

IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	
Capaian	100,40%	100,00%	100,68%	100,55%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				100,55%	

Realisasi IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2023 adalah sebesar 100,55% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,55%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya sebesar 100,68%. Penurunan tersebut disebabkan karena jumlah pemeriksaan Tematik Nasional yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2022 sehingga alokasi penambahan skor lebih sedikit. Realisasi IK 4 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional telah berjalan secara keseluruhan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai Tahun 2020, meskipun sejak periode Renstra 2016 – 2020 sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan partisipasi aktif dalam seluruh pemeriksaan tematik nasional, yaitu dengan berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Sama seperti Tahun 2022, pada Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara konsisten berpartisipasi aktif dalam setiap pemeriksaan tematik nasional, sehingga capaian IK ini bisa tetap mencapai target seperti Tahun 2022.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional pada Kawasan Perdesaan Wonosari di Kabupaten Boalemo. Untuk Tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi

Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

**e. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan menugaskan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk terlibat dalam pemeriksaan yang diperintahkan Badan yang dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.

Metode pengukuran IK adalah dengan jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan adalah Surat Tugas Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan. Adapun perkembangan capaian IK 5 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 10 Perkembangan Capaian IK 5 Tahun 2020-2024**

IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,60%	100,07%	100%	
Capaian	100%	100,60%	100,07%	100%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			100,07%	100%	

Realisasi IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 100,07%, namun tetap mencapai target pada Tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan karena pada Tahun 2023, tidak ada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang terlibat untuk melaksanakan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Realisasi IK 5 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas pemeriksaan dari para pemangku kepentingan telah berjalan secara keseluruhan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan secara konsisten dicapai sesuai target pada Tahun 2020 dan Tahun 2023. Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk dapat memenuhi 100% permintaan kontribusi tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo oleh AUI atau Kemitraan Global untuk melaksanakan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, meskipun sampai tanggal 31 Desember 2023 tidak ada permintaan dari AUI atau Kemitraan Global yang masuk. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.

**f. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu Tahun berjalan. Indikator

ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase realisasi pemeriksaan tematik lokal dibagi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal ditambah alokasi penambahan skor. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan. Sumber data yang digunakan adalah BAST LHP Tematik Lokal, Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Lokal, LHP Tematik Lokal, Surat Tugas Pemeriksaan LHP Tematik Lokal, dan RKP. Adapun perkembangan capaian IK 6 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 11 Perkembangan Capaian IK 6 Tahun 2020-2024**

IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101%	100,30%	100,51%	100%	
Capaian	101%	100,30%	100,51%	100%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				100%	

Realisasi IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2023 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 100,51%. Realisasi IK 6 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal telah berjalan secara keseluruhan.

IKU ini merupakan IKU yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan secara konsisten dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sesuai Renstra 2020 - 2024 sehingga capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 mencapai target 100% yang ditetapkan.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini pada Tahun 2023 adalah dengan melaksanakan pemeriksaan dukungan LKPD yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo, sehingga capaian Indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,00%. Ke depannya, BPK

Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan rencana yang dilampirkan dalam periode Renstra 2020 – 2024.

**g. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Metode pengukuran IK adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, dan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator. Perkembangan capaian IK 7 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 12 Perkembangan Capaian IK 7 Tahun 2020-2024**

IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,47	4,41	4,80	4,79	
Capaian	89,40%	88,20%	96,00%	95,80%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				95,80%	

Realisasi IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 adalah sebesar 4,70 dari target sebesar 5,00, sehingga capaiannya sebesar 95,80%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 4,70. Realisasi IK 7 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 95,80%.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BPK terkait dengan nilai dasar BPK. Upaya tersebut diantaranya adalah pengarahan dari Kepala Perwakilan, membentuk tim pengembangan dan internalisasi budaya kerja, mensosialisasikan melalui berbagai media, dll. Meskipun telah melaksanakan upaya untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru mendapatkan skor 4,79 dari target skor 5,00. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai dasar yang ditanamkan dan diterapkan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum optimal.

IK ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sampai dengan akhir periode Renstra 2016 - 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo baru memperoleh nilai 4,65, masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu 5,00. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, diharapkan agar BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai nilai 5,00 sesuai yang ditargetkan oleh BPK secara keseluruhan nasional, meskipun pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih belum memenuhi target karena masih di bawah skor 5,00.

Capaian ini akan terus ditingkatkan pada Tahun berikutnya, dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap Tahun dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

#### **h. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah Sangat Memuaskan (>90-100), A adalah Memuaskan (>80-90), BB adalah Sangat Baik (>70-80), B adalah Baik (>60-70), CC adalah Cukup (>50-60), C adalah Kurang (>30-50), D adalah Sangat Kurang (0-30). Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Metode pengukuran IK adalah melalui evaluasi yang dilaksanakan dalam dua tahap:

- 1) *Self-assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK; dan
- 2) Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Itama yang memuat hasil evaluasi AKIP Unit Kerja oleh Itama dan hasil

evaluasi/penilaian mandiri Satuan Kerja. Adapun perkembangan capaian IK 8 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 13 Perkembangan Capaian IK 8 Tahun 2020-2024**

IK 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (87,00)
Realisasi	AA (94,25)	AA (91,16)	AA (93,15)	AA (91,40)	
Capaian	109,59%	104,78%	105,00%	102,70%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				105,06%	

Realisasi IK 8 Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 adalah sebesar 91,40 dari target sebesar 89,00, sehingga capaiannya sebesar 102,70%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 93,15. Penurunan nilai AKIP Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022, disebabkan karena:

- 1) Terdapat perubahan indikator penilaian AKIP Tahun 2023; dan
- 2) Belum terdapat upaya inovatif tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Realisasi IK 8 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 102,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan AKIP yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan baik sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai nilai AA sesuai dengan target yang diharapkan, serta masuk ke dalam jajaran sepuluh besar unit kerja dengan hasil evaluasi terbaik di BPK secara nasional. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan nilai evaluasi dari Inspektorat Utama BPK.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan terus mengupayakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara tertib dan memperhatikan arahan-arahan/catatan dari Inspektorat Utama BPK serta menjalin komunikasi intensif dengan Itama untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkesinambungan.

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memang melampaui target kinerja dengan memperoleh predikat AA dari target A yang diharapkan pada Tahun



2023, namun untuk menjaga capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan menyusun inovasi tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

**i. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL). Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Komponen-komponen pengukuran IK 9 terdiri dari:

- 1) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.
- 2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.
- 3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.
- 4) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitasaktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.
- 5) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 20% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, ditambah 15% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN, ditambah 20% dikalikan tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP, ditambah 20% dikalikan tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP dan 25% dikalikan tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL . Sumber data yang digunakan adalah laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI. Adapun perkembangan capaian IK 9 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 14 Perkembangan Capaian IK 9 Tahun 2020-2024**

IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	96%
Realisasi	99,66%	99,66%	90,27%	99,93%	
Capaian	104,91%	103,81%	93,07%	101,97%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				104,09%	

Realisasi IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2023 adalah sebesar 90,27% dari target sebesar 98%, sehingga capaiannya sebesar 93,07%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan/kenaikan dibandingkan nilai Tahun sebelumnya sebesar 90,27%. Realisasi IK 9 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 104,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara optimal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai tingkat pemanfaatan TI sebesar 99,59%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk terus mempertahankan tingkat pemanfaatan TI agar dapat berada di atas angka 96%, dan target ini dapat dicapai selama dua Tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, namun mengalami penurunan di Tahun 2022 dan meningkat kembali dengan signifikan di Tahun 2023. Berdasarkan hasil laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah optimal dengan mendapatkan nilai 100 dalam pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan seperti SiAP, SMP, SiPTL dan non pemeriksaan seperti SISDM.

Sedangkan untuk aplikasi JASMIN, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai sebesar 99,51% karena masih terdapat beberapa catatan.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023, memperoleh penghargaan dari Sekretaris Jenderal BPK TI yaitu Penghargaan Peringkat Pertama Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangkaian Kegiatan HUT BPK ke-77.

BPK Perwakilan Gorontalo akan terus mengupayakan agar capaian yang diperoleh bisa meningkat Tahun berikutnya dengan terus mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun non pemeriksaan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh BPK secara keseluruhan, baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan. BPK Perwakilan Gorontalo bahkan telah memiliki portal internal yang dinamakan GOROPS dan Portal BPK, sebagai sarana *data sharing* untuk memperlancar pekerjaan di setiap subbagian di bawah Sekretariat Perwakilan serta Subauditorat Gorontalo.

#### **j. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. *Innovatice Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada dan dapat direalisasikan melalui

- 1) Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap Tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.
- 2) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan,

pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 50% dikalikan tingkat penyusunan *innovative practice* ditambah 50% dikalikan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Sumber data yang digunakan adalah laporan pelaksanaan manajemen pengetahuan yang mencakup usulan *best practice*, laporan atas penerapan *best practice*, dan laporan atas pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Adapun perkembangan capaian IK 10 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 15 Perkembangan Capaian IK 10 Tahun 2020-2024**

IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	125%	137,50%	100,00%	101,43%	
Capaian	125%	137,50%	100,00%	101,43%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				101,43%	

Realisasi IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2023 adalah sebesar 101,43% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 101,43%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan (meningkat) dibandingkan nilai pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Realisasi IK 10 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 101,43%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan sangat baik dan optimal.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai Tahun 2020. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen mencapai tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 100%, dan target tersebut dapat dilampaui selama tiga Tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk memenuhi kinerja ini adalah dengan mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja yang dapat dijadikan

sebagai *best practice* serta menyusun dan menyampaikan usulan replikasi *best practice* kepada Ditama Revbang. Untuk usulan replikasi *Best Practice* yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan *sharing knowledge* pada pihak lain.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memperoleh capaian sebesar 101,43% dari target 100%, dengan memberikan usulan replikasi *best practice* terkait “BukTi – Aplikasi Buku Tamu Digital BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo enam aktivitas Manajemen Pengetahuan dari empat jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan yang direncanakan. Manajemen Pengetahuan yang telah dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dua aktivitas Bantuan Rekan Sejawat, dua aktivitas Reviu Pasca Aktivitas, dan Pelaksanaan Forum Transfer Pengetahuan.

Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

**k. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan.

Aktivitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk dapat mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat *entry meeting* pemeriksaan kinerja dan DTT untuk menyampaikan kode

etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan serta menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut.

Metode pengukuran IK adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, 4,00 - 5,00 adalah sangat memuaskan. Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survei pengukuran indikator. Adapun perkembangan capaian IK 11 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 16 Perkembangan Capaian IK 11 Tahun 2020-2024**

IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,47	3,89	3,65	4,61	
Capaian	91,32%	102,37%	96,05%	105,00%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024				121,32%	

Realisasi IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2023 adalah sebesar 4,61 dari target sebesar 3,80, sehingga capaiannya sebesar 121,32%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan nilai Tahun sebelumnya sebesar 3,65. Realisasi IK 11 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 121,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan para pemangku kepentingan telah berjalan dengan sangat baik dan perlu untuk dipertahankan.

IK ini merupakan IK yang baru berlaku mulai Tahun 2020, dan untuk periode Renstra 2020 - 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mencapai nilai kepuasan 3,80 atau dengan predikat “Memuaskan” dari para pemangku kepentingan. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 3,89. Namun pada Tahun 2022 berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dengan capaian sebesar 3,65. Selanjutnya, di Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berhasil melaksanakan evaluasi sehingga dapat melampaui target dengan memperoleh capaian sebesar 4,61.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan

posisi, tugas dan fungsi BPK, serta menjaga kualitas hubungan dan komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.

#### **1. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- 1). Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 Tahun (SPKN);
- 2). Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 Tahun (UU Nomor 5/2014);
- 3). Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP seTahun untuk pemeriksa dan 20 JP seTahun untuk non pemeriksa; dan
- 4). Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

*Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja yang diharapkan adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam dua Tahun atau 40 jam pelajaran dalam satu Tahun serta melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam satu Tahun.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat dibagi jumlah seluruh pegawai. Sumber data yang digunakan adalah bezzeting pegawai, SK mutasi, nota dinas penempatan, sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh Pusdiklat, Biro SDM, dan Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja, serta sertifikat KTF atau *In House Training* yang diadakan oleh

satuan kerja dengan persetujuan Badiklat PKN. Adapun perkembangan capaian IK 12 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 17 Perkembangan Capaian IK 12 Tahun 2020-2024**

IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100,00%	100%	
Capaian	100%	100%	100,00%	100%	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			100,00%	100%	

Realisasi IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 sama dengan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 100%. Realisasi IK 12 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan atas jam diklat pengembangan kompetensi oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara baik.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah memenuhi target jam pelajaran yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai.

Untuk ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.

**m. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai



keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan;
3. Pencapaian Output; dan
4. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Metode pengukuran IK adalah dengan perhitungan persentase 60% dikalikan nilai EKA ditambah 40% dikalikan nilai EPA. Sumber data yang digunakan adalah rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran (Biro Keuangan). Adapun perkembangan capaian IK 13 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 18 Perkembangan Capaian IK 13 Tahun 2020-2024**

IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88,00%	88,50%	87,50%
Realisasi	89,34%	92,43%	90,04%	89,72%	
Capaian	102,69%	105,63%	102,32%	101,38	
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			102,90%	102,54%	

Realisasi IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 89,72% dari target sebesar 88,50%, sehingga capaiannya sebesar 101,38%. Realisasi IK ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada Tahun sebelumnya sebesar 90,04%, namun capaian ini masih memenuhi target yang telah ditetapkan Tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan karena belum konsistennya penyerapan anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan dana serta realisasi capaian output belum sesuai dengan rencana. Realisasi IK 13 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 102,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berjalan secara baik dan optimal.

Pada akhir periode Renstra 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat kinerja anggaran sebesar 87,78%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Untuk periode Renstra 2020 – 2024, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berupaya untuk terus mempertahankan capaian tingkat kinerja anggaran agar minimal dapat di atas 87,50%, dan selama dua Tahun berturut-turut yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2023 target tersebut dapat dilampaui.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) memaksimalkan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- 2) melaksanakan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satker;
- 3) memonitoring dan memastikan pencapaian target Rencana Output (RO) melalui Subbagian Keuangan; dan
- 4) melaksanakan koordinasi secara berkala antara Subbagian Keuangan dengan unit kerja lainnya terkait dengan permasalahan dan/atau kendala dalam rangka penyelesaian target RO.

Untuk tetap menjaga capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

### **C. ANALISIS EFISIENSI**

Dalam rangka mewujudkan Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.
- b) Merubah metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.
- c) Optimalisasi Portal Satuan Kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo  
Portal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu tool bagi pegawai pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan terkait sharing informasi. Portal perwakilan selain berfungsi sebagai media komunikasi melalui fitur discussion board dan media kolaborasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai media file sharing/repository untuk mendukung pengelolaan dokumen di satuan kerja. Optimalisasi Portal membantu BPK Perwakilan dalam mengelola kinerja organisasi, mempermudah dan meningkatkan efisiensi operasional kerja sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas kinerja organisasi. Bagi pegawai, selain dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja individu juga dapat mempermudah aktivitas

kolaborasi. Stakeholder pun akan mendapatkan manfaat kemudahan, kecepatan, dan menghemat tenaga dan biaya dalam mendapatkan layanan BPK Perwakilan.

- d) Pemanfaatan layanan konsultasi hukum online untuk memudahkan aktivitas manajemen pengetahuan. Konsultasi hukum online ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai baik penunjang/pendukung maupun pemeriksa. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan.

## 2. Pengelolaan BMN,

Upaya yang dilakukan untuk efisiensi adalah melakukan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan, antara lain yaitu komputer, laptop, AC, dan printer.

## **D. BUDAYA KERJA**

Sebagai upaya Perwakilan Gorontalo menyamakan kebiasaan dan pola pikir seluruh individu pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, telah dikembangkan Budaya Kerja “TINEPO” untuk dapat mendukung peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara berkesinambungan. Budaya Kerja “TINEPO” singkatan dari Terampil, Integritas dan Independen, Nyaman, Empati, Profesionalisme, dan Kolaboratif.

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berupaya mempertahankan sekaligus terus meningkatkan budaya kerja yang telah terbangun selama ini dengan menumbuhkan rasa saling peduli, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar BPK yang telah tertanam sebelumnya. Budaya kerja yang telah berjalan dengan baik ini akan ikut memunculkan pola berpikir yang positif kepada seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pola pikir dari setiap pegawai terus ditanamkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaannya saja, namun setiap pegawai ditanamkan pola berpikir untuk bekerja dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi orang lain dan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Hal inilah yang selama ini menjadi faktor pendukung dalam kaitannya ketercapaian kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menanamkan budaya kerja dan pola berpikir bekerja untuk menghasilkan suatu manfaat.

## E. REALISASI ANGGARAN

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada TA 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp16.737.520.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.693.869.032,00 atau 99,74% dari anggaran. Anggaran dan realisasi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasi TA 2022 yakni anggaran sebesar Rp14.708.811.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.510.358.196,00 atau 98,65%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selama TA 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengalami penyesuaian anggaran sebanyak 15 kali, dari nilai anggaran awal sebesar Rp15.388.824.000,00 kemudian dirasionalisasi menjadi sebesar Rp16.737.520.000,00. Meskipun terdapat rasionalisasi, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mengupayakan efisiensi pemanfaatan anggaran sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada *output* serta *outcomes* yang berkurang.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program yakni Program Pemeriksaan Keuangan Negara, yang kemudian dialokasikan untuk mencapai Indikator Kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 19 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Rp4.533.103.000	Rp4.514.685.773	82,86%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Rp1.588.189.000	Rp1.586.998.646	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rp237.935.000,00	Rp236.635.493,00	72,48%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Rp692.864.586,00	Rp692.864.586,00	100,55%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Rp0	Rp0	100,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Rp3.628.385.414	Rp3.627.184.576	100,00%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Rp177.741.000	Rp177.717.393	Sangat Memuaskan (4,79)
8	Hasil Evaluasi AKIP	Rp57.290.000	Rp57.289.830	AA (91,40)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Rp3.603.474.000	Rp3.602.490.416	99,93%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Rp235.750.000	Rp235.750.000	101,43%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Rp1.044.573.000	Rp1.040.936.837	Sangat Memuaskan (4,61)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Rp301.270.000	Rp301.265.843	100,00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	Rp636.945.000	Rp636.541.006	89,72%

\*)Data berdasarkan TLRHP IHPS Semester I 2023 sedangkan data SIPTL per 31 Desember 2023 sebesar 78,08%

## F. INOVASI

BPK perlu melakukan langkah inovasi dalam pelaksanaan tugas fungsinya untuk meningkatkan peranannya dalam pemeriksaan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, dengan adanya inovasi dapat meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh *stakeholder* sehingga dapat membangun rasa percaya yang lebih kepada BPK. Hal ini tidak terkecuali dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melakukan langkah inovasi, baik dalam hal pemeriksaan maupun dalam hal pelayanan publik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Adapun inovasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yaitu:

### 1. *Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SiAP-LK dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo*

Dalam rangka memenuhi sasaran BPK secara keseluruhan dan untuk mencegah adanya langkah yang tidak dilaksanakan serta tidak selesainya penyusunan KKP LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terutama Subauditorat Gorontalo telah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP-LK) dalam pemeriksaan LKPD se-Provinsi Gorontalo sesuai wilayah tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pemanfaatan SiAP-LK ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemeriksaan, memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah dikembangkan dengan serius oleh BPK, serta untuk mengamankan seluruh data serta proses bisnis pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Subauditorat Gorontalo.

Inovasi ini telah ditetapkan sebagai *best practice* oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. *Pemilihan dan Penugasan Tenaga Ahli yang Bekerja untuk dan Atas Nama BPK dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan.*

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 23/SK/XIX.GOR/03/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pemilihan dan penugasan Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam

pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) sehingga *ouput* atas pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

### 3. *Pembuatan Video Podcast.*

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 40/SK/XIX.GOR/07/2021 menetapkan instruksi kerja mekanisme pembuatan *video podcast*. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada para *stakeholder* dan membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* serta partisipasi dari *stakeholder* BPK maka diperlukan suatu media komunikasi yang menarik.

### 4. *Optimalisasi Portal Satuan Kerja dan Pengembangan Smart Office BPK Gorontalo (SOFIE-GO)*

Portal satuan kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu *tool* bagi pegawai pada kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengatasi permasalahan terkait sharing informasi. Portal perwakilan selain berfungsi sebagai media komunikasi melalui fitur *discussion board* dan media kolaborasi, juga dapat dimanfaatkan sebagai media *file sharing/repository* untuk mendukung pengelolaan dokumen di satuan kerja.

BPK Perwakilan Gorontalo sebelumnya telah memiliki portal perwakilan, namun demikian tampilan situs, halaman situs, dan menu yang terdapat dalam portal satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan dan perlu dibuat agar *user friendly*, serta penggunaannya belum optimal serta informasi di dalamnya belum terkini/mutakhir (*update*).

Pengembangan portal telah dilaksanakan sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan *redesain portal* dan menambahkan beberapa *folder sharing* disetiap unit kerja. Selanjutnya di Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan pengembangan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh Tim *Smart Office* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor Nomor 36/SK/XIX.GOR/08/2023, dengan menambahkan beberapa fitur diantaranya:

#### a. *Dashboard Monitoring IKU dan Realisasi Anggaran*

- b. *Dashboard Bezetting Pegawai Subbag SDM*
- c. *Dashboard Klinik dan Kesehatan*
- d. *Dashboard Realisasi Anggaran*
- e. *Dashboard Penghubung ke Aplikasi Inovasi Perwakilan*
  - 1) BukTI (Buku Tamu Digital)
  - 2) Aplikasi GorLIB
  - 3) Klinik Lestari
  - 4) Aplikasi PinjamKDO
  - 5) Aplikasi PinjamRUANG

Optimalisasi Portal membantu BPK Perwakilan dalam mengelola kinerja organisasi, mempermudah dan meningkatkan efisiensi operasional kerja sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas kinerja organisasi. Bagi pegawai, selain dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja individu juga dapat mempermudah aktivitas kolaborasi. *Stakeholder* pun akan mendapatkan manfaat kemudahan, kecepatan, dan menghemat tenaga dan biaya dalam mendapatkan layanan BPK Perwakilan.

Dari aspek pengelolaan kinerja, Optimalisasi Portal BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. mempermudah para pengambil keputusan atau manajemen termasuk Kepala Perwakilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi termasuk evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Triwulanan dan/atau Tahunan;
  - b. mengoptimalkan fungsi monitoring kegiatan, realisasi anggaran dan kinerja pegawai/unit kerja/organisasi;
  - c. mengurangi aktivitas penatausahaan secara manual sehingga operasional kerja lebih efisien;
  - d. menyediakan sarana kerja digital yang lebih mudah digunakan oleh pegawai sehingga dapat menyajikan data yang *real – time* dan akurat;
  - e. mempermudah pengelolaan data dan informasi termasuk dalam pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaporan kinerja Triwulanan dan Tahunan;
  - f. memudahkan setiap unit kerja untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
5. *Optimalisasi Informasi Hukum (JDIH Perwakilan) pada Website BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo*



JDIH merupakan salah satu tools untuk mengatasi kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh pegawai di kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait dengan Produk Hukum dan Informasi Hukum. JDIH merupakan jaringan hukum yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan yang optimal bagi pegawai maupun masyarakat.

Optimalisasi Informasi Hukum berupa JDIH Perwakilan di *website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk memberikan layanan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui upaya perbaikan dengan mempermudah akses pengelolaan informasi hukum berupa Peraturan Kementerian/Lembaga Negara, Peraturan Pemerintah Daerah, Catatan Berita, Tulisan Hukum dan Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan BPK Perwakilan Gorontalo melalui Optimalisasi JDIH Perwakilan pada *website* BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Optimalisasi dilakukan dengan mengelompokkan Produk Hukum dengan Informasi Hukum dalam satu media informasi yang diimplementasikan menjadi fitur JDIH Perwakilan dan membuat fitur tersebut menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan literasi digital pegawai sekaligus memberikan informasi yang menyenangkan dan informasi yang penting terkait fitur tersebut. Melalui Optimalisasi Informasi Hukum berupa JDIH Perwakilan ini diharapkan dapat mempermudah dan mendukung kelancaran tugas seluruh pegawai kantor perwakilan.

## **G. PENGHARGAAN**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo selama ini telah mendapat beberapa penghargaan baik dari internal maupun eksternal, antara lain:

1. Juara I Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
2. Juara I Tulisan Hukum Tingkat BPK Perwakilan Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
3. Juara III Pengelola *Database* Hukum Tingkat BPK Tahun 2020, yang diterima pada Oktober 2021;
4. Juara III Tulisan Hukum Tingkat BPK Tahun 2021, yang diterima pada Oktober 2022;
5. Unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020, yang diterima pada Desember 2021;

6. Juara II Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat BPK Tahun 2022, yang diterima pada Juni 2023;
7. Juara I Pengelola *Database* Hukum Tingkat BPK Tahun 2022, yang diterima pada Juni 2023;
8. Predikat “Informatif” Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Gorontalo; dan
9. Juara I Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat BPK Tahun 2023 yang diterima pada Januari 2024.

## BAB IV PENUTUP

---

### A. PENCAPAIAN SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN GORONTALO SECARA UMUM

Pada Tahun 2023 skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar 98,86 di mana skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,99 jika dibandingkan dengan pencapaian skor kinerja Tahun 2022 sebelumnya sebesar 97,87.

### B. SEBAB-SEBAB UMUM PERUBAHAN CAPAIAN SKOR

Pencapaian skor Tahun 2023 sebagai Tahun keempat periode Renstra 2020 – 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini ditandai dengan tercapainya sepuluh Indikator Kinerja dan hanya tiga Indikator Kinerja yang belum terpenuhi. Adapun penjelasan ringkasnya sebagai berikut.

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang capaiannya masih di bawah target yaitu 82,86,% dari 100%. Indikator ini menunjukkan adanya penurunan dibanding Tahun 2022 yang mencapai 83%. Permasalahan yang dihadapi masih sama yaitu adanya catatan dari Direktorat EPP atas hasil LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan perbaikan lebih lanjut di Tahun 2022 dengan cara meningkatkan *QC*, *QA*, dan *cross review* antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan capaiannya mencapai 100% sesuai dengan target sama seperti Tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *QC* dan *QA*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.
3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan data SIPTL per 31 Desember 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah mencapai angka 78,08%. Sedangkan berdasarkan data IHPS

Semester I 2023, persentase penyelesaian TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada pada angka 72,48%. Perbedaan tersebut disebabkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Semester II dan adanya 266 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo atas hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2023 (Pemeriksaan Kinerja dan DTT), entitas diberi waktu untuk menindaklanjuti dalam jangka 60 hari setelah LHP diserahkan. Tidak tercapainya target kinerja 75% tersebut disebabkan karena:

- a) Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:
  - 1) Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
  - 2) Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- b) Pemahaman Terbatas
  - 1) Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
  - 2) Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- c) Perubahan Regulasi  
Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- d) Subjek PTL Tidak Ada  
Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

Untuk menjamin agar capaian di Tahun berikutnya dapat memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong Pemerintah Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengoptimalkan upaya-upaya percepatan TLRHP melalui kegiatan:

- 1) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- 2) Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);

- 3) Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
  - 4) Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;
  - 5) Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
  - 6) Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan; dan
  - 7) Berkoordinasi dengan AKN VI dalam rangka percepatan validasi TL.
4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional capaiannya memenuhi target sama seperti Tahun sebelumnya, di mana Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat mencapai 100,55%. Hal ini tercapai karena pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional pada Kawasan Perdesaan Wonosari. Untuk Tahun-Tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.
  5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan capaiannya 100,00% mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sama seperti Tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.
  6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal mencapai target, yaitu 100,00% dari target 100%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023 telah melaksanakan pemeriksaan tematik lokal perwakilan terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo sehingga capaian indikator Kinerja ini dapat memperoleh skor 100,00%.
  7. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK capaiannya masih belum memenuhi target seperti Tahun sebelumnya, yaitu hanya memperoleh nilai 4,79 dari target sebesar 5,00. Capaian Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya

dengan nilai 4,80. Belum tercapainya target disebabkan karena masih ada aspek-aspek nilai dasar BPK yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

8. IK 8 Hasil Evaluasi AKIP capaiannya telah melampaui target sama seperti Tahun sebelumnya, yaitu mendapat nilai 91,40 (AA) dibandingkan dengan target sebesar 89,00 (A). Hal ini dimungkinkan karena penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dilakukan secara tertib serta memperhatikan arahan-arahan dari Itama BPK. Capaian BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memang melampaui target kinerja dengan memperoleh predikat AA dari target A yang diharapkan pada Tahun 2023, namun untuk menjaga capaian tersebut BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan menyusun inovasi tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
9. IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, capaiannya adalah 99,93%, yang mana tidak mencapai target ditetapkan sebesar 98%. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan TI dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan telah berjalan secara optimal.
10. IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, capaiannya adalah 101,43% dari target sebesar 100%. Hal ini tercapai karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan usulan replikasi *best practice* terkait “BukTi – Aplikasi Buku Tamu Digital BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo enam aktivitas Manajemen Pengetahuan dari empat jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan yang direncanakan. Manajemen Pengetahuan yang telah dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, dua aktivitas Bantuan Rekan Sejawat, dua aktivitas Reviu Pasca Aktivitas, dan Pelaksanaan Forum Transfer Pengetahuan. Ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen

pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

11. IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, capaiannya adalah 4,61 dan tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 3,80. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 senilai 3,65. Capaian ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti entitas, media, serta pihak-pihak lain seperti penyedia jasa serta instansi vertikal lainnya. Hal ini akan terus ditingkatkan lagi pada Tahun 2024.
12. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, capaiannya adalah 100%, yang mana mencapai target yang diharapkan sebesar 100%. Hal ini dimungkinkan karena adanya pelaksanaan pelaksanaan diklat *in-house* berupa diklat pemeriksaan LKPD serta mengoptimalkan diklat-diklat daring yang semakin mudah diakses oleh setiap pegawai. Untuk ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.
13. IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran, capaiannya melampaui target sama seperti Tahun sebelumnya, yaitu sebesar 89,72% dibandingkan target 88,50%. Hal ini dimungkinkan karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan.

### **C. KENDALA/HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN IK TAHUN 2023**

Kendala/hambatan dalam pencapaian IK Tahun 2023 dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Tidak tercapainya target IK 1 terjadi karena masih kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga meskipun telah diupayakan *QA*, *QC*, *cross review* dan diskusi terarah, namun Direktorat EPP

masih menemukan catatan-catatan yang harus diperbaiki lagi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Atas kelemahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan proses penyusunan secara lebih intens, mengoptimalkan upaya *QA, QC, cross review* dan diskusi terarah antar pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo agar LHP yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

## **2. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

IK 3 tidak tercapai karena selama Tahun 2023 karena BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kualitas rekomendasi sehingga pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut. Selain itu, tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena:

- a) Komitmen dalam penyelesaian rekomendasi temuan belum sama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Entitas, antara lain:
  - 1) Majelis TP/TGR tidak berjalan efektif;
  - 2) Penyelesaian TLRHP belum menjadi indikator pengukuran kinerja satker.
- b) Pemahaman Terbatas
  - 1) Substansi temuan dan rekomendasi belum dipahami dengan baik oleh entitas sehingga menyebabkan kesalahpahaman interpretasi rekomendasi.
  - 2) Kurangnya pemahaman terkait kewajiban melaksanakan TLRHP. Pemeriksaan dianggap berakhir saat LHP diserahkan padahal seharusnya setelah rekomendasi selesai ditindaklanjuti.
- c) Perubahan Regulasi  
Regulasi yang menjadi kriteria pada temuan sudah dicabut/tidak berlaku.
- d) Subjek PTL Tidak Ada  
Subjek PTL meninggal/sakit, perusahaan bubar, bangkrut, dll.

## **3. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Target IK 7 masih belum tercapai karena pegawai masih belum familiar dengan survei yang dikirimkan via *e-mail* BPK sehingga masih memerlukan sosialisasi yang lebih memadai serta pendampingan pegawai ketika mengisi kuesioner dari pihak ketiga. Hal ini akan diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi Visi, Misi, dan Nilai Dasar serta Kode Etik BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa



menyelesaikan seluruh survei yang dikirim. Selain itu, akan ditingkatkan komunikasi dengan LO dari pihak Direktorat PSMK untuk menjamin agar seluruh pegawai penerima survei telah mengisi survei yang dikirimkan.

#### **D. STRATEGI DAN RENCANA AKSI DALAM PEMENUHAN TARGET TAHUN 2024**

Strategi dan rencana aksi dalam pemenuhan target Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

##### **1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan memperbaiki kualitas penyusunan LHP, termasuk dengan memperketat evaluasi antar tim (*cross review*) serta melaksanakan diskusi dengan tim pemeriksa yang LHP-nya minim koreksi dari Direktorat EPP semester sebelumnya agar kiat-kiat penyusunan LHP dapat saling dibagikan di antara pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

##### **2. IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya untuk menjaga capaian ini melalui upaya peningkatan kualitas *QC* dan *QA*, serta melakukan *cross review* serta diskusi terarah terkait setiap hasil pemeriksaan untuk melihat kesesuaian hasil dengan harapan penugasan.

##### **3. IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong Pemerintah Daerah agar menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengoptimalkan upaya-upaya percepatan TLRHP melalui kegiatan:

- a) penyampaian tindak lanjut langsung melalui SiPTL dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiPTL dengan terus mengkomunikasikan dengan Inspektorat Daerah masing-masing entitas;
- b) Membuka kesempatan pemutakhiran tindak lanjut setiap bulan dan menjalin komunikasi intensif setiap triwulan untuk menampung kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut (konsultasi dan bimbingan percepatan TL);
- c) Inventarisasi tindak lanjut yang belum terselesaikan berdasarkan sebaran OPD beserta penyebabnya;
- d) Berkoordinasi dengan Inspektorat selaku koordinator penyelesaian tindak lanjut agar lebih intens dalam melakukan monitoring TLRHP pada setiap OPD;

- e) Menyarankan kepada entitas agar menjadikan penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator penilaian kinerja OPD;
- f) Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dua minggu setelah LHP diserahkan;
- g) Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki prosentase tertinggi dalam Penyelesaian Tindak Lanjut dan yang memiliki progres tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut dalam satu tahun; dan
- h) Berkoordinasi dengan AKN VI dalam rangka percepatan validasi TL.

**4. IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

**5. IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan secara konsisten berupaya untuk memenuhi kontribusi keterlibatan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi permintaan pemeriksaan yang masuk dari para pemangku kepentingan apabila adanya permohonan dari AUI dan Pusat Kemitraan Global.

**6. IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan rencana yang dilampirkan dalam periode Renstra 2020 – 2024.

**7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Terus melakukan sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menginformasikan kepada responden-responden terpilih untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK yang disebarakan setiap Tahun, serta melakukan pendampingan kepada para pegawai agar bisa menyelesaikan seluruh survei yang dikirim.

**8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus menjaga kualitas pelaporan akuntabilitasnya dengan terus melaksanakan rekomendasi/catatan dari Inspektorat Utama BPK dan mengembangkan upaya inovatif tingkat perwakilan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan/atau Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

## **9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus mengupayakan untuk memaksimalkan penggunaan seluruh aplikasi BPK oleh seluruh pegawai, melalui kegiatan:

- a) melakukan inventarisasi nama pegawai yang belum melengkapi dan/atau memuktahirkan data dan/atau dokumen di Aplikasi SISDM;
- b) mengisi SiAP DTT dan Kinerja;
- c) memonitoring dan menindaklanjuti seluruh surat masuk di Aplikasi JASMIN;
- d) menginput data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan Semester II pada Aplikasi SMP; dan
- e) memonitoring dan/atau menelaah setiap dokumen tindak lanjut yang telah diinput dalam Aplikasi SiPTL.

## **10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjaga capaian Indikator Kinerja ini dengan terus mengupayakan berbagai inovasi yang dituangkan dalam usulan *best practice* atau replikasi *best practice*, serta melaksanakan manajemen pengetahuan atas seluruh kegiatan yang bermanfaat bagi pemeriksaan maupun non pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

## **11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

- a) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus berupaya mengomunikasikan posisi, tugas dan fungsi BPK, serta menjaga kualitas hubungan dan komunikasi tidak hanya dengan entitas yang diperiksa namun juga dengan seluruh *stakeholders* lain di Provinsi Gorontalo termasuk pihak swasta yang menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo seperti media dan penyedia jasa.
- b) Meningkatkan komunikasi dengan pihak Direktorat PSMK untuk memastikan bahwa seluruh pegawai penerima survei via *e-mail* telah melaksanakan kewajibannya mengisi kuesioner implementasi nilai dasar BPK.

## **12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan terus mendorong pencapaian target kinerja ini dengan tetap melaksanakan diklat *in-house* serta memberikan informasi terkait diklat-diklat daring baik yang diselenggarakan oleh Internal BPK maupun oleh Institusi Eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.

## **13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Subbagian Keuangan akan secara konsisten menjaga kualitas pemanfaatan anggaran BPK Perwakilan Provinsi

Gorontalo dengan terus memperhatikan arahan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Unit Kerja lain di BPK yang relevan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan kegiatan:

- a) memaksimalkan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- b) melaksanakan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK Satker;
- c) memonitoring dan memastikan pencapaian target Rencana Output (RO) melalui Subbagian Keuangan; dan
- d) melaksanakan koordinasi secara berkala antara Subbagian Keuangan dengan unit kerja lainnya terkait dengan permasalahan dan/atau kendala dalam rangka penyelesaian target RO.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Strategi 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>							
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan kegiatan Pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan;</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan</li> <li>Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan interim LKPD.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>• Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan;</li> <li>• Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan</li> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan interim LKPD serta PDTT Banparpol.</li> </ul>
								<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>• Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan;</li> <li>• Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik;</li> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 serta PDTT Banparpol.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>• Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan;</li> <li>• Melaksanakan <i>cross</i> reuiu antar Tim Pemeriksaan atas LHP</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>LKPD;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci LKPD atas 7 (tujuh) entitas; dan</li> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022.</li> </ul> <p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul> <p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> <li>• Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap pengurusan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>• Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; dan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul>
								<p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan; dan</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.</li> </ul>
								<p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan melalui lapming dan/atau diskusi mingguan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan;</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik;</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan <i>cross</i> reviu antar Tim pemeriksaan atas LHP Semester II; dan</li> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II.</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Program Pemeriksaan (P2) Interim LKPD TA 2022</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2022 pada tujuh entitas dengan memedomani P2; dan</li> <li>Menyusun Program Pemeriksaan (P2) Terinci LKPD TA 2022.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Program Pemeriksaan (P2) Terinci LKPD TA 2022; dan</li> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 pada tujuh entitas dengan memedomani P2.</li> </ul> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP LKPD TA 2022 pada 7 (tujuh) entitas</li> </ul> <p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP LKPD TA 2022 pada tujuh entitas; dan</li> <li>Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2022 ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2022 ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.</li> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2023.</li> </ul> <p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2023.</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun P2 Pemeriksaan Semester II; dan</li> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2.</li> </ul> <p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>P2.</p> <p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Semester II dengan memedomani P2.</li> </ul> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP Pemeriksaan Semester II</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP Pemeriksaan Semester II; dan</li> <li>Menyerahkan LHP Pemeriksaan Semester II ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.</li> </ul>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul>
								<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>• Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>• Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak berwenang pada Kantor Pusat BPK dalam rangka percepatan validasi dokumen TL pada SIPTL;</li> <li>• Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>• Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>• Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul>
								<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL dengan melaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen TLRHP;</li> <li>• Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; dan</li> <li>• Pemantauan persentase TL melalui SIPTL.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul> <p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul> <p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak berwenang pada Kantor Pusat BPK dalam rangka percepatan validasi dokumen TL pada SIPTL;</li> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>BPK; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;</li> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL dengan melaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen TLRHP;</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; dan</li> <li>Pemantauan persentase TL melalui SIPTL.</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</li> <li>• Melakukan perubahan atas RKP apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan tema pemeriksaan tematik nasional; dan</li> <li>• Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan.</li> </ul> <p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan.</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan interim tematik nasional.</li> </ul> <p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan interim tematik nasional.</li> <li>• Penyusunan LHPP pemeriksaan interim tematik nasional.</li> </ul> <p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional.</li> </ul> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional.</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan LHP atas pemeriksaan terinci tematik nasional.</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</p> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>kepentingan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
								<p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
								<p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>• Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</p> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</p> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>• Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</li> </ul> <p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>• Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal;</li> <li>• Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's; dan</li> <li>• Melakukan perubahan atas RKP apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan tema pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan pemeriksaan atas topik yang akan dijadikan tematik lokal dengan memperhatikan ketersediaan pemeriksa.</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemeriksaan interim tematik lokal.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								September 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHPP tematik lokal.</li> </ul>
								Oktober 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik lokal.</li> </ul>
								November 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan LHP tematik lokal.</li> </ul>
								Desember 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan LHP tematik lokal.</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember 2023	Januari 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul>
								Februari 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan;</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul>
								Maret 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul>
								April 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul> <p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul> <p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul> <p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul> <p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.
								November 2023
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Pengarahannya Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> </ul>
								Desember 2023
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, kode etik, dan nilai dasar BPK serta budaya kerja dalam pengarahannya maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A  (89,00)	-	-	-	A  (89,00)	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023;</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan</li> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								Manajer IKU lewat Inputer IKU.
								<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi;</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya;</li> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi;</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								Agustus 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								September 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								Oktober 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi;</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya;</li> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; dan</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								November 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbagian dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul>
								<p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja mengacu Keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya.</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	25%	93%	95%	98%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Biro TI BPK dalam rangka evaluasi pemanfaatan Layanan TI BPK;</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Biro TI BPK dalam rangka evaluasi pemanfaatan Layanan TI BPK;</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
								<p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol, SMP, dan SiPTL; dan</li> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai dalam maupun non-pemeriksaan dengan menggunakan email perwakilan, JASMIN, dan SISDM.</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,50%	25%	50%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan; dan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan LKPD TA 2022.</li> </ul>
								<p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan.</li> </ul>
								<p>Maret 2023</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan.</li> </ul>
								<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Reviu Pasca Aktivitas.</li> </ul>
								<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan.</li> </ul>
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan.</li> </ul>
								<p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan; dan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait <i>Coaching/Mentoring</i> (Habitiasi CPNS).</li> </ul>
								<p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan;</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Forum Transfer Pengetahuan.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan;</li> </ul>
								<p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> untuk Tahun 2023 di</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								lingkungan Perwakilan; Desember 2023
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i>/penerapan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Revbang. Untuk usulan <i>Best Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan <i>sharing knowledge</i> pada pihak lain.</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan Kinerja dan/atau PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan kuesioner <i>kepuasan</i> kepada pemangku</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I			TW II			TW III			TW IV			(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																<p>kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan Kinerja dan/atau PDDT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbagian Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	50%	70%	72%	75%	80%	82%	85%	90%	92%	95%	100%	Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai;</li> <li>Melaksanakan diklat persiapan LKPD TA 2022 di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Februari bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja						Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
(1)	(2)	(3)	TW I		TW II		TW III		TW IV	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan. Maret 2023</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Maret bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
											<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan April bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
											<p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Mei bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
											<p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juni bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)
												<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
												<p style="text-align: center;">Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juli bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
												<p style="text-align: center;">Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Agustus bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
												<p style="text-align: center;">September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan September bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
												<p style="text-align: center;">Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Oktober bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I			TW II			TW III			TW IV			(8)	(9)
																<p>20 JP bagi penunjang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan November bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Desember bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;</li> <li>Monitoring JP Diklat Pegawai yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang;</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	88,50%			88,50%			88,50%			88,50%			Desember 2023	<p>Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Februari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</p> <p>Maret 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Mei 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Juni 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>
								<p>Agustus 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>
								<p>September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>
								<p>Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>
								<p>November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>
								<p>Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>Melakukan asistensi kepada setiap Subbagian dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbagian Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>